

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Sehingga berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikatakan baik, walaupun desentralisasi masih rendah, ketergantungan pada pemerintah pusat/provinsi tinggi, dan kemandirian keuangan masih rendah.

1. Derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-2021 menunjukkan hasil masih rendah.
2. Rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-2021 menunjukkan pemerintah daerah kabupaten Lembata memiliki ketergantungan yang sangat tinggi.
3. Rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-2021 menunjukkan hasil masih rendah dan memiliki pola instuktif.
4. Rasio efektivitas pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-2021 sangat tidak efektif dalam pengumpulan pajak daerah.
5. Rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan pada beberapa tahun kinerja keuangan yang mengalami defisit hal ini dikarenakan meningkatnya realisasi pendapatan dari pemerintah daerah seperti PAD dan DAK.

6. . Rasio keserasian tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah kabupaten Lembata pengalokasiannya lebih didominasi oleh belanja modal

Hal ini menjelaskan bahwa perkembangan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lembata untuk tahun anggaran 2017-2021, dapat dikatakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah masih kurang efektif ini terbutki dari tabel kinerja keuangan yang memiliki tampilan tabel grafik yang kurang stabil atau mengalami kondisi fluktuatif atau kinerja keuangan yang mengalami perkembangan naik turun sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Lembata Berdasarkan perkembangan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lembata diatas terlihat bahwa dari lima tahun laporan keuangan yang dianalisis terdapat hubungan positif dan logis antara kinerja pengelolaan keuangan daerah (X) dan opini LHP-BPK (Y), yakni dari tahun 2017-2019 terdapat beberapa tahun yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik.

Walaupun berdasarkan perhitungan yang menggunakan analisis rasio terdapat beberapa tahun kinerja keuangan yang kurang efektif terhadap pendapatan daerah ataupun belanja yang masih memiliki presentasi yang sangat rendah dibawah 10 persen namun hal ini tidak berpengaruh terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran

lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk setiap tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saran

1. Saran bagi pemerintahan daerah kabupaten Lembata

a. Rasio Efektivitas keuangan daerah

Pemerintah kabupaten Lembata perlu meningkatkan tingkat efektivitasnya agar memenuhi kriteria sangat efektif terhadap kinerja keuangan dengan cara realisasi anggaran penerimaan daerah harus lebih besar daripada target yang ditetapkan agar pemerintah daerah kabupaten Lembata selalu mendapatkan kriteria sangat efektif di tahun berikutnya.

b. Rasio kemandirian keuangan daerah

Bagi pemerintah daerah kabupaten Lembata diharapkan lebih meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan mencari sektor-sektor guna meningkatkan PAD serta menyeimbangkan pembangunan untuk daerah kota dan kabupaten dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang pentingnya pembayaran pajak guna pembangunan daerah dan mencegah kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal semakin menurun, hal ini memiliki implikasi dimana pemerintah kabupaten Lembata sebaiknya meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah yang

semakin menurun dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebaiknya menggali sumber penerimaan daerah yang potensial sehingga dapat mengelolanya dengan baik untuk meningkatkan PAD pada daerahnya masing-masing.

Rasio pengelolaan belanja

Saran bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pengelolaan belanja daerah dengan cara mendorong dan meningkatkan percepatan penyerapan terhadap APBD yang efisien serta melakukan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap Rasio keserasian

Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat, juga lebih memfokuskan kepada belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan cara menetapkan alokasi bujet yang lebih berani, dimana dana perimbangan bisa diprioritaskan bagi belanja modal seperti belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

d. Rasio pertumbuhan

Melakukan upaya ekstensifikasi yakni melakukan terobosan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan juga melalui usaha intensifikasi yakni dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah serta Mendorong peningkatan investasi daerah melalui penyertaan modal pada Lembaga keuangan dan Bank dalam rangka mendorong investasi swasta untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaya, Anggi Meliantha. 2010. Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Halim Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Krisnawati, Evi Ica. 2005. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Muhamadiyah Malang.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasisari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Vol. 9. No. 3, 421-436.
- Nordiawan Deddi. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta: Pustaka Pergaulan, hal. 20 ibid,57.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 138-150.
- Saputra, Dori. 2014. " Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat." Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Negeri Padang.

- Talamati, Eka Sari. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Pada Masa Otonomi Daerah. Skripsi (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 45-49.
- Undang-Undang publik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU RI No.15 tahun 2006 *Tentang BPK*, Jakarta: Sinar Grafika, Kewenangan dimaksud merupakan perwujudan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
- Wenny, Dhia Cherrya. 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupatendan Kota di Propinsi Sumatera Selatan." Jurnal Ilmiah Stie Mdp. Vol. 2 No. 1 September 2012
- Whittaker, James B. The Government Performance and Result Act of 1995 A mandate for Strategic Planning and Performance Measurement, Educational Service Institute. Arlington. Virginia. USA
- Yani Ahmad.2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuwono, Soni dkk. 2005. Pengantar Sektor Publik. Bayumedia Publishing.